

## **BAB V**

### **SIMPULAN,IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul “ Hideki Tojo dalam Kabinet Jepang : Suatu Kajian Kepemimpinan Militer Perdana Menteri Jepang pada Masa Perang Pasifik 1941 – 1944. Kesimpulan menunjuk pada jawaban dan permasalahan penelitian yang telah dikaji oleh penulis didalam bab sebelumnya.

#### **5.1 Kesimpulan**

Pertama, negara Jepang dari tahun 1930-1941 dilanda suatu depresi ekonomi dan kekacauan politik yang membuat Jepang berada pada suatu masa krisis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak berbanding lurus dengan sumber daya dan finansial adalah dua faktor utama yang menyebabkan Jepang berada dalam masa krisis, lalu dengan semakin berkembangnya kaum militer yang merembes masuk dalam kabinet Jepang telah mempengaruhi kebijakan dalam kabinet (*Diet*).

Kaum militeris mayoritas memegang kendali dalam kabinet Jepang dan tidak memberikan ruang bagi kaum oposisi untuk secara bebas mengusulkan kebijakan dalam kabinet. Usulan kaum militer adalah dengan jalur ekspansi ke daerah-daerah di Asia, sebagai langkah awal Jepang sebagai penguasa di Asia. Upaya ini diharapkan dapat membawa Jepang keluar dari depresi ekonomi, karena dengan menguasai daerah di Asia, Jepang tidak akan kekurangan sumber daya. Kebijakan dalam negeri pun menjadi perhatian dengan dibentuknya Undang-Undang Mobilisasi Umum dan penggabungan partai – partai politik dengan tujuan nantinya dapat memberikan suatu dukungan penuh bagi kaum militer dalam kabinet untuk meningkatkan kekuatan militer dalam negeri.

Kedua , semakin menguatnya pengaruh militer dalam kabinet ini memaksa Jepang untuk melebarkan pengaruhnya sebagai sebuah negara ekspansionis. Pendudukan terhadap Manchuria, China dan daerah Asia lainnya dirasa perlu bagi Jepang. Kebijakan ini mendapat kecaman dari Amerika Serikat, mengingat nantinya Jepang dapat membahayakan kestabilan politik

internasional. Amerika memberikan suatu negosiasi yang isinya agar Jepang tidak melanjutkan upaya ekspansionisnya di daerah Asia.

Tekanan dari pihak luar ini memberikan perbincangan serius dalam kabinet Jepang. Pengambilan keputusan tentang negosiasi yang pada akhirnya kebijakan ini ditolak. Fumimaro Kono yang memegang jabatan sebagai Perdana Menteri ditekan oleh kaum militer untuk terus melakukan kebijakan-kebijakan ekspansionis, yang pada akhirnya ia tidak sanggup melakukannya dan melakukan pengunduran diri pada tahun 1941 lalu digantikan oleh Hideki Tojo.

Ketiga, pengangkatan Hideki Tojo sebagai Perdana Menteri Jepang adalah hasil dari usulan kaum militer kepada kabinet dan Kaisar. Latar Belakang Hideki Tojo sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri adalah tentara militer *Kwangtung Army*. Ia diangkat pada 18 Oktober 1941 sebagai Perdana Menteri Jepang yang sah. Latar belakang militer dan kelayolannya pada negara serta kaisar menjadi pendukung bagi dirinya untuk dipilih sebagai Perdana Menteri mengingat pada tahun 1941 dominasi kaum militer sangatlah kuat dalam kabinet Jepang. Pemilihan Tojo sebagai Perdana Menteri ini diharapkan oleh kaum militer dalam melancarkan usaha ekspansionis Jepang di Asia.

Keempat, kontrol nasional dan ekspansionis ada dua kebijakan utama Perdana Menteri Tojo selama masa pemerintahannya. Pengawasan yang ketat terhadap seluruh aspek dalam negeri Jepang dianggap perlu dilakukan untuk kestabilan negara Jepang.

Kebijakan ekspansionis Jepang terus dilakukan pada pemerintahan Hideki Tojo yang menjadi fokus utama Jepang. Negosiasi yang diberikan oleh Amerika tidak dapat diterima, sebaliknya Jepang memutuskan untuk berkoalisi dengan Jerman dan Italia, membentuk Pakta Tiga Negara sebagai upaya pencapaian ambisi Jepang menjadi penguasa di Asia. Akhir dari negosiasi yang berujung buntu yang menyebabkan dideklarasikannya perang. Jepang menyerang pangkalan Amerika di Pearl Harbour sebagai awal dari Perang Pasifik.

Kelima, Perang Pasifik yang awalnya menjanjikan kemenangan perang bagi Jepang ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kekuatan militer Jepang tidak sebanding dengan Amerika

yang mendapat dukungan penuh dari Sekutu. Kekalahan – kekalahan di medan perang telah memberikan suatu gambaran akan kekalahan Jepang di Perang Pasifik.

Hideki Tojo terancam posisinya sebagai Perdana Menteri Jepang. Penasihat kaisar, Kido mengusulkan kepada kaisar untuk memberhentikan Tojo sebagai Perdana Menteri Jepang, seiring dengan banyak kekalahan – kekalahan di medan perang serta ketidakpercayaan pada dirinya dalam kabinet semakin menguat. Tanggal 18 Juli 1944 Hideki Tojo dcopt jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang.

## **5.2 Implikasi dan Rekomendasi**

Penelitian penulis diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan pada perkuliahan khususnya materi Sejarah Asia Timur tentang negara Jepang pada masa Perang Pasifik. Terlebih untuk jurusan Pendidikan Sejarah dalam mata kuliah Sejarah Asia Timur. Penulis juga berharap penulisan karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan pembelajaran sejarah secara umum.

Selain itu, penulis akan memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik dengan Sejarah Jepang. Penulisan ilmiah mengenai Hideki Tojo dalam kabinet Jepang sangatlah terbatas dan juga masih terbatasnya juga kajian mengenai Hideki Tojo yang ditulis dalam bahasa Indonesia.

Untuk penelitan selanjutnya penulis mengusulkan beberapa pokok kajian yang menarik untuk dibahas lebih mendalam. Hal tersebut antara lain : Pers Jepang sebagai alat indoktrinasi selama masa Perang Pasifik. Kedua : pertentangan sayap kiri dan sayap kanan Jepang dalam kabinet Jepang tahun 1941-1944. Ketiga, peranan Perhimpunan *Taisei Yosukan Kai* dalam politik dalam negeri Jepang tahun 1940. Penulis juga merekomendasikan bagi peneliti lainnya untuk lebih mampu mengakses literatur yang lebih banyak agar penelitian mengenai Jepang dalam kurun waktu 1941- 1944 dapat lebih komprehensif.